

MAHASISWA DAN KEKUASAAN
(Konflik Sosial Pada Pemilihan Umum Raya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya 2013 sampai 2015)

Mohammad Dzulkifli

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Dzulkifli023@gmail.com

Sugeng Harianto

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Sugengharianto@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang konflik sosial yang terjadi pada pemilihan umum raya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Surabaya 2013 sampai 2015. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi konflik sosial yang terjadi pada Pemilihan Umum Raya (Pemira) BEM Unesa periode 2013 sampai 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *struktural konflik* Ralf Dahrendorf. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi pada Pemira BEM Unesa dilatarbelakangi oleh konflik horizontal dan konflik vertikal, yang melibatkan mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan birokrasi. Peran Organisasi Ekstra Kampus (Omek) sebagai kelompok kepentingan menjadi aktor konflik sosial tersebut, dimana Omek satu dengan Omek yang lain memiliki orientasi yang sama sehingga kedudukan Presiden BEM Unesa diperebutkan. Konflik sosial yang terjadi di BEM Unesa terjadi karena adanya distribusi otoritas yang tidak merata, sehingga melahirkan dua kelompok yakni kelompok superordinat dan subordinat. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai kelompok dominan menempati posisi superordinat dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai kelompok yang didominasi sebagai kelompok subordinat. Konflik tersebut mengakibatkan BEM Unesa dibekukan selama dua periode, yang tentunya hal ini memberikan dampak kepada internal kampus dan eksternal kampus. Adapun resolusi konflik yang ditawarkan oleh pihak birokrasi kampus meliputi mediasi, rekonstruksi Pemira dan dibekukan untuk sementara waktu. Karena mediasi dan rekonstruksi Pemira gagal dijalankan maka BEM Unesa untuk sementara waktu dibekukan. Pada bulan desember 2015 BEM Unesa kembali dibentuk melalui semangat rekonsiliasi mahasiswa.

Kata Kunci: Konflik Sosial, BEM UNESA, dan Mahasiswa

Abstract

This study discusses the social conflicts that occur in the general elections highway Student Executive Body (BEM) Surabaya State University from 2013 to 2015. The aim is to find and identify the social conflict on Election Kingdom (Pemira) BEM Unesa the period from 2013 to 2015. Research this uses a qualitative method with a structural approach of conflict Ralf Dahrendorf. The data collection is done by interview and documentation study. These results indicate that the social conflict in Pemira BEM Unesa motivated by conflicts horizontal and vertical conflicts, involving students and students and students with the bureaucracy. Role of Campus Extra Organisation (Omek) as interest groups become actors of social conflict, where Omek one with Omek others have the same orientation so that the position of President BEM Unesa grabs. The social conflict in BEM Unesa occurs because of the uneven distribution of authority, thus giving birth to two groups, superordinate and subordinate groups. Islamic Students Association (HMI) as the dominant group occupies a superordinate position and the Indonesian Islamic Students Movement (PMII) and the Indonesian National Student Movement (GMNI) as a group dominated as a subordinate group. The conflict resulted in BEM Unesa frozen for two periods, which of course it had an impact on internal and external college campus. As for the conflict resolution offered by the campus bureaucracy includes mediation, reconstruction Pemira and frozen for a while. Because mediation and reconstruction Pemira failed to run the BEM Unesa temporarily frozen. In December 2015 BEM Unesa re-formed through the spirit of reconciliation student.

Keywords: Social Conflict, BEM UNESA, and Students

PENDAHULUAN

Universitas Negeri Surabaya (UNESA) merupakan lembaga perguruan tinggi, yang melahirkan manusia berkualitas dan profesional. Unesa tidak hanya menyelenggarakan program pendidikan namun juga menyelenggarakan program non kependidikan. Keberadaan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) intra kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan/prodi dan lain-lain di Unesa merupakan salah satu implementasi program non kependidikan yang dicanangkan oleh Unesa, sebagai respon atas program non kependidikan yang dicanangkan oleh Unesa. Mereka para mahasiswa Unesa ikut berpartisipasi didalamnya. Ditambah lagi kesadaran yang mereka miliki atas manfaat berorganisasi membuat banyak dari mereka para mahasiswa Unesa terjun didalamnya.

Dalam pelaksanaannya, Ormawa intra kampus di Unesa menggunakan sistem demokrasi. Karena menggunakan sistem demokrasi, maka tentu dalam menjalankan fungsi maupun tugasnya Ormawa Unesa mengambil sikap yakni sistem pemerintahan dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Salah satu bentuk implemantasi dari digunakannya sistem demokrasi di Ormawa Unesa adalah dengan diadakannya Pemira untuk memilih calon ketua dan wakil ketua yang nantinya akan menduduki sistem dalam Ormawa Unesa.

Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pasti akan menimbulkan dampak positif dan negatif. (Surbakti. 2010: 30). Kutipan tersebut kiranya dapat mewakili konflik yang terjadi di Unesa. Bahwa Ormawa Unesa yang mulanya diselenggarakan sebagai wadah berproses bagi mahasiswa Unesa pada pelaksanaannya tidak berjalan semestinya. Banyak dari mahasiswa Unesa sendiri yang menjadikan Ormawa intra kampus sebagai lahan persaingan politik yang berujung pada timbulnya bibit-bibit konflik dan perpecahan. Persaingan politik tersebut akan terlihat jelas salah satunya adalah ketika moment-moment Pemira. Selain itu, banyak dari mereka yang berproses dengan cara instan sehingga Ormawa intra kampus berjalan tidak sesuai pada cita-cita awal.

Persaingan tersebut seolah diperkeruh dengan aktivitas Omek di Ormawa Unesa yang dimanfaatkan oleh mahasiswa yang memiliki kepentingan tersebut sebagai kendaraan politik dalam pesta demokrasi. Artinya, sebagai bentuk eksistensinya dalam Ormawa intra maka Omek ikut andil saat proses Pemira yang tidak lain dengan mengusung dan memenagkan salah satu kadernya dalam Pemira. Hal tersebut salah satunya

diimplementasikan dengan dibentuknya asosiasi mahasiswa yang dalam fungsinya berperan sebagai partai politik dalam Pemira.

Puncaknya, bibit-bibit perselisihan itu benar-benar berubah menjadi sebuah konflik. Konflik yang berkepanjangan tanpa ada sinergitas dari mahasiswa untuk berusaha menyelesaikannya, dan salah satu produknya tidak lain yakni konflik Pemira BEM Unesa pada tahun 2013 sampai 2015.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Historis

Pergerakan mahasiswa indonesia memiliki berbagai macam cerita yang cukup panjang. Jika kita melihat sejarahnya gerakan mahasiswa sudah mulai ada sejak tahun 1908 sampai sekarang, di setiap tahun angkatan yang dicatat dalam sejarah selalu memiliki momentum-momentum penting sehingga mahasiswa menjadi garda terdepan dalam sebuah perubahan. Kaum terpelajar atau kaum intelektual memiliki pengaruh besar bagi perubahan yang terjadi di suatu wilayah atau negara. Pada abad ke 20 tokoh intelektual muda menjalankan peranya, terutama di negara terjajah khususnya. Yaitu negara-negara Asia, Eropa, dan Afrika. (Yozar Anwar. 1981 : 232).

Menurut sejarah angkatan pertama gerakan mahasiswa diawali dengan angkatan 1908 yang dimana pada 20 Mei 1908 Budi Utomo menjadi pelopor pergerakan mahasiswa yang lahir di sekolah STOVIA Jakarta. Budi utomo merupakan sebuah wadah pergerakan mahasiswa sebagai jawaban dari sikap kritis mahasiswa terhadap kolonial Belanda yang menurut mereka harus dilawan. Hal ini merupakan sebuah bentuk kebangkitan peran pemuda khususnya para mahasiswa. Pada mulanya Budi Utomo memusatkan perhatian mereka pada segi pendidikan, peningkatan, pertanian, perternakan dan perdagangan. Namun dengan kondisi yang pada kala itu menuntut agar budi utomo merubah orientasinya dari sosial ekonomi ke politik.

Pasca angkatan 1908, sejarah mencatat pergerakan mahasiswa selanjutnya di lanjutkan oleh angkatan 1928 lahirnya kelompok-kelompok studi merupakan awal mula pergerakan di angkatan 1928. Pada awalnya mahasiswa di surabaya yang bernama Soetomo mendirikan (*indonesische studie-club*) dan di tempat yang lain Soekarno dan kawan-kawanya dari sekolah tinggi teknik di Bandung mendirikan kelompok studi umum pada tanggal 11 Juli 1925. Pembentukan kedua kelompok studi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap perkembangan pergerakan mahasiswa yang kala itu di rasa tumpul. Pada tahun 1926 terbentuklah organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang merupakan organisasi yang menyatukan seluruh mahasiswa

Indonesia agar lebih menyuarakan yang namanya wawasan kebangsaan dalam diri mahasiswa. Hal itu terealisasi ketika kongres pemuda ke II yang berlangsung di Jakarta pada 26-28 oktober 1928. Yang kemudian menghasilkan Catatan sejarah yakni "SUMPAH PEMUDA". (Anwar. 1981 :244)

Kemudian sejarah juga tidak lupa mencatat peristiwa pada 1945, yakni pergerakan mahasiswa yang membawa perubahan besar terhadap nasib seluruh bangsa, yakni peristiwa Rengasdengklok yang berujung pada merdekanya Indonesia.

Tidak hanya itu, selain melakukan pergerakan menuju perubahan, mahasiswa juga menjalankan fungsinya sebagai monitoring yang mengamati serta mengontrol pergerakan penguasa. Hal tersebut dibuktikan dengan insiden Tritura. Insiden Tritura dimulai dari gejala yang dialami rakyat Indonesia atas kebijakan pemerintah yang dirasa tidak membawa kemaslahatan terhadap rakyat dan bangsa. Sebagai respon atas keadaan tersebut, mahasiswa melakukan pergerakan yang terkenal sebagai insiden Tritura dimana output dari insiden tersebut yakni tergulingnya orde lama dan berganti pada orde baru.

kontrol sosial (*Social control*) yang dilakukan mahasiswa terhadap pemerintah juga terus berlanjut, buktinya adalah peristiwa Malari yang merupakan respon mahasiswa atas kebijakan pemerintah yang dirasa kurang tepat. Hal tersebut bermula ketika pemerintah melakukan kerjasama ekonomi dengan Jepang yang dirasakan justru memberatkan rakyat. Sejarah juga mencatat peristiwa serupa seperti insiden Tritura, perbedaannya adalah insiden tersebut terjadi pada akhir orde baru dan merupakan tonggak tergulingnya orde baru. Peristiwa 1998 menjadi bukti bahwa selama ini mahasiswa tidak pernah lepas melakukan sosio control terhadap pemerintah dan menggulingkan siapa saja yang dirasa menyengsarakan rakyat.

Kajian Teori

Kekuasaan berawal dari kata "kuasa" yang berarti kemampuan maupun kesanggupan untuk berbuat sesuatu, memiliki hak atau wewenang ([http : // kbbi .web.id /](http://kbbi.web.id/) mahasiswa di akses pada 24 - 04 - 2016 pukul 19.00) sehingga mampu untuk menggerakkan orang lain maupun mempengaruhi orang lain sehingga apa yang menjadi sebuah tujuan tersebut tercapai.

Lukes (1974) dalam studinya tentang kekuasaan juga membagi konsep ini menjadi tiga dimensi yakni dimensi pertama berhubungan pada kapasitas individu atau kelompok untuk mencapai tujuan, yang mengacu pada aktor. Dimensi kedua merupakan dimensi yang mengansumsikan adanya hubungan hirarkis antara kelompok-kelompok sosial. Para aktor berada pada posisi

kuat memiliki kapasitas untuk mencapai kepentingan yang lebih jauh. Dimensi ketiga kekuasaan sifatnya mengelabui dengan melibatkan manipulasi agenda politik melainkan juga mencakup persuasi atas kelompok-kelompok subordinat, yang intinya melibatkan kontrol pemikiran dan penciptaan kesadaran semu. (Keith, Fulks. 2010 :24)

Konflik berasal dari bahasa latin yaitu *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (kelompok) yang salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Taquiri dalam Newstrom dan Davis (1977). Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlakun dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidaksetujuan kontroversin di antara dua pihak atau lebih secara berkelanjutan. (Yusuf dan Saebani. 2014 : 271)

Seorang ahli sosiologi jerman yakni George Simmel mengatakan bahwa konflik merupakan bentuk interaksi dimana tempat waktu serta intensitas dan lain sebagainya tunduk pada perubahan. Kondisi-kondisi tersebut secara positif membantu struktur sosial dan bila terjadi secara negatif akan memperlemah kerangka masyarakat. (Poloma. 1984 : 108)

Teori strukturalisme konflik karya Ralf Dahrendorf di pengaruhi oleh Marx dan konflik sosial Simmel pada tahun 1950 sampai 1960. Teori konflik merupakan sebuah alternatif terhadap fungsionalisme structural (Ritzer dan Goodman, 2011 : 153). Di dalam sistem sosial yang berada di dalam masyarakat semua elemen masyarakat menjalani peranya sebagai anggota masyarakat sehingga terciptanya sebuah keteraturan dan tercapainya ekuilibrium (keseimbangan) di dalam masyarakat. Namun hal ini di kritik oleh Dahrendorf sebab konflik merupakan sebuah kunci dari struktur sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat memiliki dua sisi, yakni sisi konflik dan sisi kerja sama (konsensus) (Poloma. 1984 : 131) dalam realitanya masyarakat memiliki kepentingan masing-masing baik individu maupun kelompok. Ketika kepentingan tersebut dikomunikasikan lalu memiliki kesamaan dan dapat di akomodasi bersama maka tidak menutup kemungkinan kedua belah pihak tersebut dapat bersatu dan melakukan sebuah kerjasama yang telah disepakati (konsensus), begitu pula sebaliknya.

Individu atau kelompok di dalam masyarakat selalu memiliki otoritas kekuasaan dengan intensitas yang berbeda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu tetapi di dalam posisi secara sosialnya. Sehingga tidak bersifat statis. Sederhananya individu dapat berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan A. Namun bukan berarti individu tersebut memiliki otoritas dalam lingkungan B. Sehingga di lingkungan A individu

tersebut berada pada tingkat Superordinat, namun di lingkungan B individu tersebut ada kemungkinan berada di posisi Subordinat

Otoritas yang melekat pada posisi tersebutlah yang menjadi kunci dari analisis Dahrendorf. Sebab otoritas selalu diartikan sebagai subordinasi atau superordinasi. Sesuai dengan pembagian peranya, bagi individu atau kelompok yang berada di wilayah superordinat maka dialah yang berkuasa dan mendominasi atas individu maupun kelompok yang berada di wilayah subordinat. Kelompok yang menempati posisi otoritas tertentu dan kelompok subordinat yang juga memiliki kepentingan tertentu ketika arah dan substansinya saling bertentangan maka konflik tersebut akan terjadi. Dan inilah kunci kedua dari teori konflik yakni “kepentingan”. (Ritzer dan Goodman. 2011 : 155)

Didalam struktur sosial, individu maupun kelompok yang memiliki otoritas yang mendominasi struktur tersebut (penguasa) berupaya untuk mempertahankan “*status quo*” sedangkan yang berada pada posisi subordinat selalu menghendaki adanya sebuah perubahan. Konflik dalam struktur sosial selalu ditemui, baik secara eksplisit maupun implisit. Dan penyatuannya kemungkinan hanya bisa ketika kedua kelompok tersebut memiliki kepentingan yang sama. Namun secara luas hal ini juga belum tentu mengakhiri sebuah konflik, sebab kemajemukan masyarakat itu sendiri dengan kelompok yang berbeda-beda dan juga kepentingan yang berbeda pula.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan perspektif teori Strukturalisme konflik Ralf Dahrendorf. Fokus penelitiannya adalah melihat konflik sosial yang terjadi dalam pemilihan umum raya BEM Unesa. Mulai dari penyebab terjadinya konflik, kronologi, resolusi, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi konflik sosial yang terjadi pada pemilihan umum raya BEM universitas periode 2013 sampai 2015.

Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturalisme konflik karya Dahrendorf. Dahrendorf melihat ketundukan masyarakat terhadap perubahan, dengan menekankan pertikaian dan konflik dalam sistem sosial serta melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang disintegrasi dan perubahan. Dahrendorf bahwa masyarakat memiliki dua sisi yakni konsensus dan konflik. Teoritis konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat, sedangkan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan dengan tekanan

Penelitian ini dilaksanakan di Unesa dan sekitarnya sebab tempat ini adalah tempat dimana para aktivis melaksanakan kegitanya baik kuliah, kegiatan organisasi, diskusi maupun konsolidasi. Kampus Unesa terdapat di beberapa tempat yakni : Ketintang, Lidah, Gedangan dan Tambak Sari. Subjek penelitian ini merupakan mahasiswa yang memiliki kriteria tertentu dan dianggap sebagai aktor (pelaku) pada kejadian (*moment*) tersebut. Metode dalam menentukan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang fenomena konflik yang terjadi, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilaksanakan dengan observasi, (pengamatan), wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Keseluruhan data yang telah diperoleh peneliti kumpulan menjadi satu kemudian dianalisis menggunakan teori. Proses yang dilakukan yakni mereduksi data, seluruh data baik dari observasi dan wawancara di tulis didalam sebuah catatan lapangan. Setelah itu catatan lapangan tersebut akan di tafsirkan dan dipilah – pilah sesuai dengan topik penelitian ini. Setelah itu data yang telah dipilah – pilah akan di kategorisasi berdasarkan tahun (periode) hal ini dilakukan agar data yang terkumpul tersebut dapat di rangkai secara sistematis. Setelah direduksi, data kemudian disajikan. Seluruh data tersebut dirangkai secara sistematis sesuai dengan kategorisasi lalu peneliti akan membuat bagan agar mudah dipahami. Yang terakhir data tersebut ditarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BEM Unesa merupakan bentuk struktur sosial formal didalam kampus yang mendapatkan legitimasi dari perguruan tinggi, yang dimana didalamnya terdapat anggota yang dinamakan mahasiswa, aturan / norma yang memikat anggota didalamnya dan juga struktur otoritas yang hierarkis dan sistem yang kompleks. Karena posisi pimpinan BEM Unesa yang bersifat tunggal maka hal ini sering kali diperbutkan. Sebab pimpinan BEM Unesa memiliki otoritas lebih dibandingkan anggota-anggota yang lain.

Konflik sosial terjadi dikarenakan adanya aktor yang menjalankan proses konflik tersebut. Berdasarkan hasil temuan data diatas, berikut aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Pemira BEM Unesa

Tabel 6.1

Aktor	Internal	Eksternal
Mahasiswa	√	
Dosen	√	
Birokrat	√	
BEM	√	
OMEK		√

Tabel diatas merupakan data aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Pemira BEM Unesa

Bentuk Konflik.

Pemira BEM Unesa 2013/2014 menjadi tempat berproses regenerasi kepemimpinan. Beberapa Omek besar bersaing dengan mencalonkan kadernya untuk menjadi pemimpin di struktur tertinggi organisasi intra kampus. Anggota BEM Unesa demisioner menyiapkan gelanggang pertarungan dengan membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan juga Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) selaku pihak legislatif undang-undang Republik Mahasiswa (Rema) sebagai *role* atau aturan main yang mengatur berjalanya Pemira tersebut.

Pemira BEM Unesa pada periode 2013/2014 diikuti oleh tiga Omek besar, yakni PMII, HMI, GMNI. Mengingat adanya aturan yang mengatakan bahwasanya Omek dilarang masuk ke dalam kampus, maka ketiga omek tersebut menciptakan kelompok semu. Kelompok semu tersebut merupakan kelompok yang dibentuk yang sesuai dengan aturan yang ada didalam internal kampus. Kelompok bayangan ini bertujuan sebagai kepanjangan tangan dari beberapa Omek di dalam kampus.

Dahrendorf dalam bukunya “Konflik dan Konflik dalam masyarakat industri mengatakan bahwa didalam tatanan masyarakat terjadi sebuah konflik yang dimana munculnya kelompok-kelompok didalam masyarakat. Dahrendorf kelompok-kelompok masyarakat tersebut dibagi menjadi dua yakni kelompok kepentingan dan kelompok semu. (Dahrendorf. 1986 : 221) Didalam fenomena ini kita dapat memposisikan Omek sebagai kelompok kepentingan. Sebab jelas Omek memiliki beberapa indikator untuk diposisikan sebagai kelompok kepentingan. Diantaranya Omek memiliki struktur, bentuk organisasi, program atau tujuan dan anggota dari organisasi tersebut. Kemudian asosiasi yang ada didalam kampus merupakan kelompok semu sebab didalam asosiasi tersebut memiliki kepentingan tersembunyi. Kepentingan tersembunyi diartikulasikan menjadi kepentingan nyata. Kelompok semu menjadi tempat merekrut anggota kelompok kepentingan yang terorganisir secara jelas.

Otoritas ketua BEM menjadi kunci konflik dalam fenomena ini. Sebab otoritas tersebut yang diperebutkan di dalam kontestasi Pemira. Pemegang kendali otoritas tersebut diharapkan dapat mengendalikan bawahan.

Pemira 2014 merupakan pemilihan umum yang sangat rentan dengan konflik. Pada kala itu ada 13 asosiasi yang mendaftarkan diri sedangkan yang lolos hanya 9 asosiasi misalnya dari HMI dengan asosiasi Superman, Amplop, dan Asasi. Dari GMNI dengan asosiasi Kopi dan Pandawa. Dan dari PMII dengan asosiasi Formasi dan Gempa. Asosiasi merupakan sebuah organisasi yang mendapatkan legalitas dari MPM yang fungsinya hampir sama dengan partai politik yang ada di Indonesia. asosiasi memang sengaja dibentuk oleh beberapa Omek sebagai perwakilan mereka yang memiliki legalitas di dalam kampus. Disisi yang lain juga digunakan sebagai kendaraan politik dari beberapa elit kampus.

Pada tahun 2014 proses Pemira mengalami sebuah kegagalan yang disebabkan terjadi nya konflik ditataran mahasiswa. Pada waktu itu ada salah satu pihak dari asosiasi yang telah mencalonkan diri sebagai kandidat berkasnya dihilangkan oleh anggota KPU. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima oleh asosiasi tersebut. Kemudian asosiasi tersebut mengajukan gugatan kepada Panwaslu. Namun Panwaslu disitu juga mengalami kegagalan. Kegagalan pada penetapan panwaslu yang berbeda dengan penetapan KPU, artinya disini kerja KPU tidaklah diawasi oleh Panwaslu sehingga terjadi banyak kecacatan Pemira pada kala itu. Sehingga keputusan apapun yang di ambil oleh KPU tidak bisa diterima, sebab keputusan dari KPU tidaklah diketahui oleh Panwaslu. Sebab didalam Pemira Panwaslu memiliki fungsi kontrol dalam Pemira, ketika ada beberapa rangkaian Pemira tersebut ada hal-hal yang tidak di ketahui oleh Panwaslu artinya Pemilihan tersebut terjadi kecacatan.

Setelah terjadi beberapa konflik yang berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan oleh mahasiswa maka PR 3 selaku pihak yang membidangi permasalahan kemahasiswaan turun kelapangan guna menyelesaikan masalah tersebut. Namun pada kala itu surat panggilan kepada asosiasi yang mengajukan gugatan kepada panitia Pemira tidak pernah di hiraukan sehingga mediasi tidak berjalan, sehingga mereka menduduki kantor KPU dan melakukan penyegelan yang menyebabkan aktifitas KPU tidak bisa berjalan sebagai mana mestinya. Karena melihat Pemira-Pemira sebelumnya ketika Pemira sering kali terjadi keributan yang menyebabkan kerusakan-kerusakan pada fasilitas umum. Maka PR 3 pada kala itu Pak Warsono melakukan kebijakan dengan membekukan BEM Unesa selama satu periode.

Konflik horizontal ini terjadi dikarenakan yang terlibat dalam konflik diatas merupakan mahasiswa dengan mahasiswa. maka ada kesetaraan didalam status sosial. Persamaan hak dan kewajiban menjadi dua hal yang melekat pada status sosial yang dimana semua mahasiswa memiliki hal tersebut. Omek maupun BEM Unesa merupakan sebuah pranata sosial yang dimana keduanya adalah wadah bertemunya kumpulan kumpulan mahasiswa.

Dinamika konflik yang berada didalam kampus tidak luput dari beberapa elemen yang berada didalam kampus. Elemen-elemen tersebut meliputi dosen dan birokrasi. Dalam kontestasi pemilihan BEM Unesa tentu ada campur tangan dari elemen-elemen terkait yang berupaya untuk memenangkan kelompoknya dengan harapan dapat menjalankan visi dan misi yang dibangun oleh kelompok tersebut.

Kontestasi pemilihan umum raya melibatkan dosen maupun birokrasi yang dimana memiliki latar belakang ideologi yang sama. Sebab bagaimana pun juga para birokrasi dan dosen pada dahulunya juga pernah menjadi mahasiswa dan diantara mereka juga pernah menjadi seorang aktivis mahasiswa. Sehingga terjadi hubungan kerja sama antara komponen satu dengan komponen yang lain.

Penyebab Konflik

Perebutan eksistensi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik dikalangan organisasi mahasiswa. aktivis mahasiswa membutuhkan eksistensi guna menunjang karirnya didalam dunia politik, termasuk politik kampus. Eksistensi mahasiswa didalam kampus membantu mahasiswa untuk mengenal atau membangun jaringan (*link*) keatas. Baik link berupa kedekatan dengan birokrasi kampus maupun jaringan dengan partai politik. Posisi elite mahasiswa menjadi salah satu nilai tawar tersendiri bagi aktivis kampus ketika melakukan komunikasi dengan jajaran birokrasi maupun pemerintah. Sebab posisi elite mahasiswa memiliki peran untuk melakukan mobilisasi massa, sehingga dengan begitu elite mahasiswa mendapatkan perhatian khusus baik dari birokrasi kampus maupun pemerintah. Pergerakan mahasiswa tidak dapat berjalan secara masif apabila tidak ada elite mahasiswa yang dimana elite mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjadi dalang dalam setiap pergerakan mahasiswa, mencari titik permasalahan bersama lalu kemudian diwacanakan sehingga bisa menciptakan landasan baru dalam pergerakan mahasiswa.

Aktivis mahasiswa 1998 bisa dijadikan gambaran bahwasanya para elite mahasiswa tersebut menggunakan eksistensi nya guna membantu dirinya dalam dunia politik. Para tokoh aktivis angkatan 1998 yang pada kala itu menjadi jendral lapangan demonstrasi mahasiswa

ketika menggulingkan rezim Soeharto kini telah menjadi politisi sukses di pemerintahan. Para jendral lapangan tersebut dilirik oleh partai politik karena memiliki nilai tawar ketika menjadi mahasiswa. contohnya Adian Napitupulu, dahulu beliau adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan sekaligus aktivis angkatan 1998. Beliau juga salah satu aktor dibalik runtuhnya rezim Soeharto ketika demonstrasi 20 Mei 1998. Sekarang Adian Napitupulu merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lalu kemudian ada Wanda Hamidah salah seorang mahasiswi Universitas Trisakti dan juga aktivis angkatan 1998 beliau juga salah satu aktor dibalik demonstrasi 98 yang dimana beliau sekarang menjadi politikus Partai Amanat Nasional (PAN), lalu ada Fahri Hamzah, salah seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang juga beliau adalah tokoh dibalik demonstrasi angkatan 1998. Beliau sekarang menjadi politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga menjabat sebagai wakil ketua DPR RI.

Fenomena diatas menjadi salah satu alasan mengapa eksistensi didalam kampus menjadi perebutan para aktivis mahasiswa. Para aktivis mahasiswa tentunya memiliki cita-cita untuk menjadi orang terpandang, oleh sebab itu mereka mempersiapkan prosesnya mulai dari mahasiswa mengacu pada fenomena diatas. Ketika menjadi mahasiswa mereka aktif di organisasi lalu kemudian menjadi elite mahasiswa guna ketika lulus sebagai mahasiswa mereka bisa dilirik dan direkrut oleh partai politik sehingga mereka bisa menjadi seorang politikus partai.

Fenomena pragmatisme kini menjadi sebuah acuan baru dalam diri mahasiswa. biaya perkuliahan yang semakin mahal menjadikan para mahasiswa berfikir kembali ketika mengabdikan diri menjadi aktivis mahasiswa, bahkan ketika menjadi aktivis pun mahasiswa menghitung untung rugi. Sehingga tidak lagi tulus dalam memperjuangkan idealismenya. Independensi mahasiswa merupakan komoditas langka dan tergadaikan dengan kepentingan kepentingan yang lain.

BEM Unesa yang secara struktur kelembagaan didanai oleh birokrasi kampus, dan sumber keuangannya berasal dari 5% akumulasi biaya perkuliahan dari satu universitas menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi para elite mahasiswa. Hal inilah yang membiaskan orientasi mahasiswa. Organisasi BEM Unesa sebagai tempat mahasiswa berproses dan belajar berorganisasi hanya dijadikan tameng atau alasan secara normatif. Selebihnya ada sebuah kepentingan-kepentingan lain yang secara implisit disisipkan menjadi tujuan utama yang salah kepentingan tersebut adalah orientasi profit, yang dalam bahasa Dahrendorf disebutkan sebagai kepentingan terselubung.

Pemikiran pragmatis seperti ini sekarang tidak lagi menjadi pemikiran individu namun juga merambah kepada pragmatisme kolektif. Sehingga ada sebuah perkumpulan individu yang bersatu dengan tujuan yang sama lalu kemudian membentuk sebuah kelompok. Kelompok tersebut yang akan dijadikan sebagai prasyarat atau alat untuk menduduki BEM Unesa, secara sederhananya kelompok yang berkonflik tersebut, mereka berkonflik merebutkan kekuasaan dengan tujuan dapat menguasai anggaran dana yang diberikan oleh birokrasi kampus. Selain didalam BEM Unesa terdapat anggaran yang cukup besar, pemegang struktur BEM Unesa juga dapat membuat kegiatan yang dimana kegiatan tersebut secara laten bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, namun ada sisi menifestnya yakni bantuan dana dari pateri yang didatangkan untuk oprasional kegiatan. Misalkan seminar nasional yang mengundang tokoh-tokoh politik nasional secara laten tokoh-tokoh tersebut didatangkan untuk mengembangkan pengetahuan dari mahasiswa yang dimana kegiatan tersebut sudah dianggarkan dari dalam internal BEM Unesa namun dibalik itu tokoh-tokoh nasional tersebut juga menggelontorkan dana guna berjalanya kegiatan tersebut.

Tahun politik nasional selalu menjadi lahan yang ideal bagi pemegang kekuasaan didalam kampus. Sebab pada tahun politik banyak para tokoh politik yang melakukan kampanye-kampanye pemenangan. Sebagai organisasi tertinggi ditingkat universitas BEM Unesa memiliki nilai tawar untuk berkerja sama dengan tokoh-tokoh politik tersebut. BEM Unesa dapat menawarkan panggung buat mereka dan mereka memberikan dana kampanye sebagai timbal balik atas panggung yang ditawarkan. Hal ini tidak bersifat tendensius kepada salah satu calon kandidat, namun tawar menawar seperti ini bisa ditawarkan kembali kepada calon kadidat yang lain, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dana kampanye tersebut bisa masuk kedalam internal BEM. Lalu kemudian ketika telah masuk kedalam internal BEM dilakukan pembagian yang pada umumnya 10% untuk ketua BEM selaku pimpinan didalam internal BEM Unesa dan 20% untuk penyalur kegiatan dan sisanya bisa diberikan kepada kelompok-kelompok lain yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut.

Dahrendorf mengatakan bahwasanya ada sebuah pembagian otoritas yang tidak merata, Sehingga hal ini yang memicu terjadinya konflik pada mahasiswa. Otoritas tersebut mencakup kebijakan dan wewenang. Sehingga dapat kita simpulkan didalam struktur Ormawa intra kampus (BEM Unesa) terdapat dua kelompok yakni kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai. Kelompok yang berkuasa merupakan kelompok yang memiliki otoritas penuh dalam mengatur jalanya

sistematika organisasi BEM Unesa, Sedangkan kelompok dikuasai adalah kelompok-kelompok yang tidak dapat menjangkau otoritas tersebut.

Otoritas ketua BEM menjadi kunci konflik dalam fenomena ini. Sebab otoritas tersebut yang diperebutkan di dalam kontestasi Pemira. Pemegang kendali otoritas tersebut diharapkan dapat mengendalikan bawahan. Otoritas tersebut tidaklah konstan melainkan berada pada posisi ketua BEM. Seorang tokoh elite di dalam omek tidak harus memegang otoritas didalam BEM Unesa. Begitu pula sebaliknya, seorang mahasiswa yang didalam lingkungan omek berada di posisi subordinat mungkin menempati posisi superordinat didalam BEM Unesa. Hal inilah yang disebut oleh dahrendorf sebagai koordinasi secara imperatif

Pembagian otoritas didalam BEM unesa sebelum terjadinya Pemira 2013/2014 menghasilkan kelompok HMI sebagai kelompok berkuasa dan kelompok-kelompok yang lain sebagai kelompok yang dikuasai. Hal ini di dasarkan atas kelompok HMI pada pemilihan sebelumnya mengalami kemenangan, sehingga mayoritas struktur BEM Unesa ditempati oleh kader-kader HMI dan kader-kader dari kelompok yang lain secara minoritas menempati posisi didalam struktur BEM Unesa. Jika dilihat dari posisi dan peran yang di tempati kelompok pemenang selalu pada posisi yang strategis dan memiliki peran yang sentral didalam struktur dan kelompok yang kalah tentu ditempatkan di tempat yang tidak strategis dan juga peranya kurang diperhitungkan atau lebih sederhananya sebagai pelengkap didalam struktur organisasi tersebut.

Selama tujuh dekade Pemira ketua BEM Unesa HMI sebagai kelompok yang mendominasi didalam kampus. Selama tujuh periode pergantian struktur BEM Unesa, Presiden BEM Unesa diduduki oleh kader-kader HMI. Dominasi yang demikian tentu selalu dipertahankan sebagai mana yang dikatakan oleh Dahrendorf bahwa didalam stuktur sosial individu maupun kelompok yang memiliki otoritas yang mendominasi struktur tersebut (penguasa) berupaya untuk mempertahankan "*status quo*" sedangkan kelompok-kelompok yang terdominasi selalu menginginkan adanya sebuah perubahan. Namun pada fenomenanya perubahan tersebut mengalami kegagalan berkali-kali sehingga dominasi ini dianggap sebagai dinasti kekuasaan.

Proses dominasi yang begitu lama membuat kelompok-kelompok yang dibawah memimpikan sebuah perubahan sistem. Mereka yang dibawah menyadari bahwa dominasi yang terlalu lama menyebabkan kepentingan-kepentingan mereka tidak terakomodasi dengan baik. Pihak penguasa selalu seenaknya sendiri dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Baik itu kebijakan mengenai regulasi atau aturan maupun

kebijakan-kebijakan yang lain. Jika kita melihat fenomena di kampus unesa kelompok-kelompok yang tidak berkuasa seringkali suaranya tidak didengarkan oleh pihak penguasa, para penguasa kerap kali membela birokrasi kampus dan merekayasa seolah-olah tidak ada apa-apa. Misalkan pemusatan penjual makanan yang ada didalam kampus yang lalu kemudian di pusatkan di *foodcourt* hal ini ditentang oleh beberapa kelompok mahasiswa, sebab dengan di pusatkan tempat makanan seperti itu para mahasiswa yang berada di lokasi yang jauh dengan *foodcourt* akan merasa keberatan. Namun suara-suara seperti ini tidak didengarkan oleh petinggi kampus.

Kelompok penguasa pun tentu tidak mau kekuasaannya terusik dan diganggu oleh kelompok-kelompok lain, sehingga kelompok penguasa kerap kali berkerja sama dengan kelompok penguasa yang lain misalnya kelompok dosen, kelompok birokrasi kampus dan kelompok yang lain-lain. Hal ini bertujuan ketika terjadi sebuah gangguan dari kelompok-kelompok dibawah ada kelompok yang lain, yang membantu mengamankan posisi tersebut dan begitu pula sebaliknya.

Pertarungan kelompok berkuasa dan kelompok yang dikuasai terlihat ketika pemilihan umum raya sebelumnya. Ketika itu orang-orang didalam KPU merupakan orang-orang dari kelompok penguasa sebelumnya, yang dimana pada pemilihan tersebut undang-undang dibuat dan telah dikondisikan oleh kelompok penguasa. Didalam undang-undang tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon kandidat sebagai prasyarat administratif. Prasyarat tersebut memang sengaja dibuat oleh kelompok penguasa dengan harapan dapat menjegal salah satu calon kandidat yang menjadi musuh dari kandidat kelompok penguasa. Fenomena yang lain yang dapat memperkuat adanya pelanggaran kekuasaan ialah disalah satu TPS (Tempat Pemungutan Suara) terjadi penggelembungan suara yang dimana penggelembungan ini mengarah kepada kelompok penguasa. Total pemilih yang terdaftar dalam absensi pemilih yang totalnya sekitar 300 pemilih dan ternyata surat suara ketika penghitungan melonjak sebesar 500 suara yang dimana dari total suara tersebut mengarah kepada calon dari kelompok penguasa

Akibat Konflik

Dinamika konflik dalam struktur sosial akan melahirkan kelompok superordinat dan kelompok subordinat kelompok yang berkuasa akan menjadi kelompok Superordinat. Hal ini didasarkan atas sistematika demokrasi yang mengacu pada suara terbanyak "*one man one vote*". Kelompok berkuasa jelas kelompok yang memiliki suara terbanyak dari mahasiswa. sedangkan kelompok subordinat merupakan

kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi Pemira yang diakibatkan karena mereka kalah massa. Sehingga mereka dapat dikatakan sebagai kelompok subordinat

Otoritas yang melekat pada posisi tersebutlah yang menjadi kunci dari analisis Dahrendorf. Sebab otoritas selalu diartikan sebagai subordinasi atau superordinasi. Sesuai dengan pembagian peranya, bagi individu atau kelompok yang bertada di wilayah superordinat maka dialah yang berkuasa dan mendominasi atas individu maupun kelompok yang berada di wilayah subordinat. Kelompok yang menempati posisi otoritas tertentu dan kelompok subordinat yang juga memiliki kepentingan tertentu ketika arah dan substansinya saling bertentangan maka konflik tersebut akan terjadi. Dan inilah kunci kedua dari teori konflik yakni "kepentingan". (Ritzer dan Goodman. 2011 : 15)

Konflik atau gesekan yang begitu keras mengakibatkan BEM Unesa dibekukan karena dirasa konflik tersebut sudah tidak sehat dan mengarah pada pengrusakan-pengrusakan fasilitas umum. Pada tahun 2014 proses Pemira mengalami sebuah kegagalan yang disebabkan terjadi nya konflik ditataran mahasiswa. pada waktu itu ada salah satu pihak dari asosiasi yang telah mencalonkan diri sebagai kandidat berkasnya dihilangkan oleh anggota KPU. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima oleh asosiasi tersebut. lalu kemudian asosiasi tersebut mengajukan gugatan kepada Panwaslu. Namun Panwaslu disitu juga mengalami kejanggalan. Kejanggalan pada penetapan panwaslu yang berbeda dengan penetapan KPU, artinya disini kerja KPU tidaklah diawasi oleh Panwaslu sehingga terjadi banyak kecacatan Pemira pada kala itu. Sehingga keputusan apapun yang di ambil oleh KPU tidak bisa diterima, sebab keputusan dari KPU tidaklah diketahui oleh Pamwaslu. Sebab didalam Pemira Panwslu memiliki fungsi kontrol dalam pemilihan raya mahasiswa. ketika ada beberapa rangkaian Pemira tersebut ada hal-hal yang tidak diketahui oleh Panwaslu artinya Pemilihan tersebut terjadi kecacatan.

Setelah terjadi beberapa konflik yang berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan oleh mahasiswa maka PR 3 selaku pihak yang membidangi permasalahan kemahasiswaan turun kelapangan guna menyelesaikan masalah tersebut. namun pada kala itu surat panggilan kepada asosiasi yang megajukan gugatan kepada panitia Pemira tidak pernah di hiraukan sehingga mediasi tidak berjalan. Namun mereka menduduki kantor KPU dan melakukan penyegelan yang menyebabkan aktifitas KPU tidak bisa berjalan sebagai mana mestinya. Karena melihat Pemira-Pemira sebelumnya ketika Pemira sering kali terjadi kericuhan yang menyebabkann kerusakan-kerusakan pada fasilitas umum. Maka dengan segala kebijaksanaan PR 3 pada kala itu Pak Warsono

melakukan kebijakan dengan membekukan BEM Unesa selama satu periode.

Tabel 6.2

<u>Nama Organisasi</u>	<u>Kategori</u>	<u>Indikator</u>
HMI	Superordinat	Berkuasa, Masa banyak
PMII	Subordinat	Tidak berkuasa, masa sedikit
GMNI	Subordinat	Tidak berkuasa, masa sedikit

Tabel kategorisasi kelompok

Dampak Bagi Mahasiswa

BEM universitas selaku organisasi yang mengawal berjalannya roda birokrasi kampus ketika di bekukan posisi pengawalan tersebut menjadi hilang. Selain memiliki peran pengawalan BEM Unesa juga mengemban tanggung jawab sebagai (*social control*) atau kontrol sosial dalam setiap kebijakan yang diambil oleh universitas. Pada waktu pembekuan BEM Unesa pada kala itu banyak yang menganggap bahwa pembekuan BEM Unesa memang sengaja dilakukan oleh birokrasi kampus. Tujuannya adalah untuk mengkondisikan para mahasiswa agar tidak terlalu bergejolak. Mengingat pada waktu itu Unesa juga mengalami transisi pergantian Rektor. Proses pergantian Rektor yang sangat kental dengan nuansa politik.

BEM Unesa merupakan perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan. (SK MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan

Tinggi
http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendikbud_155_1998.ht)

BEM universitas yang berperan menjalankan koordinasi bagi fakultas-fakultas yang secara koordinasi ada dibawahnya. Koordinasi tersebut terjadi ketika PKKMB. Ketika BEM Unesa dibekukan koordinasi PKKMB menjadi kacau. Sebab ketua-ketua dari setiap fakultas yang seharusnya mengarahkan anggotanya untuk menjalankan PKKMB fakultas diminta pihak birokrasi untuk mengelola PKKMB universitas. Sehingga konsentrasinya pecah untuk mengelola PKKMB fakultas dan PKKMB universitas.

Pengembangan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon intelektual yang berguna di masa depan.

Ketika BEM Unesa dibekukan maka wahana pengembangan jati diri mahasiswa menjadi kosong yang mengakibatkan pemotongan regenerasi kepemimpinan. Teputusnya regenerasi kepemimpinan didalam organisasi BEM Unesa mengakibatkan terputusnya pula komunikasi kepemimpinan antar angkatan sehingga kebijakan jangka panjang yang sudah dicanangkan oleh kepemimpinan sebelumnya tidak ada yang melanjutkan.

Ketika BEM Unesa dibekukan peran organisasi yang seharusnya menjadi penghubung komunikasi antara mahasiswa dengan birokrasi menjadi kosong. Sehingga komunikasi antara mahasiswa dengan birokrasi terhambat. Keberadaan BEM Unesa yang kosong berdampak pada kepentingan-kepentingan mahasiswa yang tidak terakomodasi dengan baik. Hal inilah yang dirasakan oleh mahasiswa ketika BEM Unesa dibekukan, Sehingga banyak yang menganggap bahwa kekosongan ini dapat dijadikan pihak birokrasi untuk semena-mena menerapkan kebijakan yang merugikan mahasiswa.

Dampak Bagi Lembaga

Sebetulnya, tidak ada dampak yang signifikan bagi dosen sebab pada dasarnya tidak banyak aktivitas yang dilakukan oleh dosen dalam Ormawa kampus. Aktifitas birokrasi kampus menjadi sangat bebas. Tidak ada yang menghalangi birokrasi kampus dalam mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan yang mereka susun sebab selama ini yang menjadi kontrol sosial (*social control*) didalam kampus tidak lain salah satunya adalah BEM Unesa. Hal itu berdampak pada dominasi birokrasi dalam kampus terhadap mahasiswa.

Putusnya hubungan BEM Unesa dengan Ormawa kampus lain. Seperti yang telah terpaparkan diatas bahwa putusnya pertalian dengan kampus lain tersebut disebabkan karena tidak ada perwakilan mahasiswa dalam momen-momen di luar kampus atau dalam bahasa sederhananya adalah tidak adanya pihak yang membangun relasi keluar. Sehingga jangankan untuk membangun relasi, membangun garis koordinasi saja mereka tidak bisa. Sehingga, puncaknya adalah vakumnya BEM Unesa menyebabkan putusnya tali hubungan dengan Ormawa kampus lain. Putusnya hubungan BEM Unesa dengan birokrasi pemerintahan.

Dampak tersebut sudah pasti terjadi. Sebab pada dasarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung birokrasi pemerintahan ikut andil dalam segala aktivitas mahasiswa. contoh kecilnya, ketika BEM Unesa ingin mengadakan acara diluar kampus, di balai kota misalnya tentu surat perijinan dan kelengkapan yang lain pasti lah berurusan dengan birokrasi pemerintahan. Apalagi, jika kegiatan BEM Unesa tersebut melibatkan para pejabat pemerintahan, tentu prosedur yang harus mereka lewati terlebih dahulu adalah perijinan birokrasi pemerintahan.

Dari situ lah hubungan antara Ormawa dengan birokrasi pemerintah berlangsung. Sehingga ketika BEM unesa tidak beraktivitas apapun, tentu juga tidak ada aktivitas atau katakanlah hubungan antara BEM unesa dengan birokrasi pemerintah.

Dampak Bagi Omek

Eksistensi Omek didalam kampus menurun, sebab pada dasarnya Ormawa intra kampus (termasuk BEM universitas) merupakan tempat bagi Omek untuk beraktivitas, melebarkan sayap dan menunjukkan eksistensi mereka. Pengkaderan Omek mengalami penurunan. Sebab BEM unesa yang menjadi salah satu wadah pengkaderan dibekukan.

Konflik yang terjadi pada mahasiswa sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik, sehingga tidak berkelanjutan dan berlarut-larut. Ada beberapa tawaran solusi konflik yang bisa diambil sebagai jalan tengah. Diantaranya:

Mediasi

Mediasi merupakan jalan tengah yang paling baik dalam penyelesaian konflik. Didalam proses mediasi pihak birokrasi kampus memanggil perwakilan dari kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk duduk bersama. Mendengarkan aspirasi yang mereka suarakan lalu kemudian didiskusikan bersama. Proses mediasi berlandaskan musyawarah mufakat, sehingga dari kedua belah pihak tidak merasa dicerai oleh berjalanya proses mediasi tersebut.

Pada waktu BEM Unesa dibekukan pihak PR 3 selaku bagian kemahasiswaan telah memanggil perwakilan dari perwakilan kelompok-kelompok kepentingan yang pada waktu itu dinamakan sebagai asosiasi mahasiswa. mediasi tersebut dilakukan secara bertahap melalui tiga tahapan. Namun dalam setiap pertemuan mediasi pihak perwakilan dari asosiasi kopi dan pandawa selalu absen, sehingga proses mediasi tersebut gagal dan tidak menghasilkan sebuah keputusan apapun

Mediasi sifatnya itu tidak memaksa, hasil keputusan mediasi itu akan dikembali lagi ke pihak-pihak yang berkonflik, lalu kemudian apakah hasil mediasi tersebut dapat diterima maupun tidak oleh pihak yang berkonflik itu menjadi sebuah keputusan dari kelompok-kelompok yang berkonflik itu sendiri. Namun karena pada waktu itu mediasi nya tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga proses mediasi tersebut tidak melahirkan suatu keputusan apapun, kemudian pembantu Rektor 3 menawarkan proses Pemira diulang dari awal.

Rekonstruksi Pemilihan Umum Raya (PEMIRA)

Proses mediasi yang mengalami kegagalan menyebabkan pihak birokrasi selaku pihak yang

menaungi mahasiswa menawarkan proses yang lain yang dimana proses itu dapat diterima oleh kelompok-kelompok yang berkonflik. Dalam proses mediasi ini pihak birokrasi berupaya menjadi mediator pada kelompok-kelompok yang berkonflik. Namun pada proses mediasi itu ada beberapa kelompok konflik yang tidak mengikuti proses mediasi yang menyebabkan mediasi tersebut tidak menghasilkan sebuah keputusan.

Rekonstruksi pemilihan umum adalah salah satu proses tawaran dari resolusi konflik dari pihak birokrasi. Pada waktu itu ketika terjadi penyimpangan proses pemilihan umum, kantor KPU diduduki oleh sekelompok mahasiswa yang dimana mereka menuntut keadilan. Sehingga pada waktu itu PR 3 turun dan menengahi perselisihan tersebut. Penyimpangan yang mereka tuntut adalah penghilangan berkas salah satu calon kandidat dan pembentukan Panwaslu tidak berbarengan dengan pembentukan KPU. KPU dibentuk lebih dahulu, lalu kemudian selang beberapa hari Panwaslu baru dibentuk. Sehingga kerja KPU tidak diawasi oleh panwaslu sebagai pihak pengontrol berjalanya proses dari tahapan-tahapan pemilu. Sebagai pihak penengah, PR 3 memberikan tawaran agar proses pembentukan KPU dan Panwaslu diulang. Artinya struktur yang sekarang dibubarkan, lalu kemudian diganti dengan struktur yang baru. Namun tawaran ini tidak disetujui oleh pihak penggugat, alasan mereka pembentukan struktur tersebut akan sama dengan struktur yang sebelumnya. Karena lembaga yang membentuk adalah lembaga yang selama ini dikuasai oleh kelompok penguasa yaitu BEM Unesa demisioner

Lamanya proses pemilihan umum raya pada periode itu yang disebabkan oleh kukuhnya kelompok-kelompok konflik berdampak pada keberlangsungan BEM Unesa berikutnya, disisi yang lain anggaran dari birokrasi yang sudah mengalami tutup buku pada semester pertama. Sehingga ditakutkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan akan terkendala.

Pembekuan Bem Unesa

Beberapa solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan Konflik tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Konflik tersebut sudah menimbulkan gesekan secara fisik dan juga pengrusakan sarana dan prasarana kampus. Sehingga pihak birokrasi mengambil jalan terakhir yakni BEM Unesa harus dibekukan. Karena persaingan yang terjadi pada tataran mahasiswa sudah tidak lagi sehat. Pembekuan BEM Unesa merupakan kebijakan yang diharapkan dari kelompok penggugat. Karena secara implisit jika kontestasi Pemira tetap dijalankan mereka akan mengalami kekalahan. Hal ini melihat persiapan dari kelompok penguasa yang secara pemetaan politik mereka sudah mengantongi beberapa pendukung dari berbagai elemen maupun kelompok.

Bahkan ada yang beranggapan bahwa pembekuan ini merupakan hasil sebuah setingan dari pihak birokrasi yang berlandaskan bahwa pada tahun itu adalah tahun politik yang dimana pada waktu itu bertepatan pada pemilihan Rektor universitas negeri Surabaya.

Setelah dibekukan selama satu periode maka pembantu Rektor 3 memberikan kesempatan kembali kepada para mahasiswa untuk membentuk BEM Unesa. Namun pada waktu itu proses nya mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh waktunya yang sangat singkat yakni antara bulan oktober sampai desember 2014. Pada waktu itu panitia konsorsium juga berada diakhir kepengurusan dan ada beberapa ketua BEM fakultas yang juga sudah demisioner. Menurut beberapa sumber juga mengatakan bahwasanya pada pembentukan BEM Unesa tersebut ada beberapa panitia konsorsium yang tidak *compatible* (tidak menguasai bagaimana cara sistematika pembentukan kembali organisasi) sehingga BEM universitas pembekuannya diperpanjang sampai dengan periode berikutnya.

HMI sebagai kelompok yang *dominan* yang dimana kelompok *dominan* tentunya memiliki kuantitas yang banyak. Sehingga mengakibatkan pertentangan didalam kelompok itu sendiri. Di Unesa kader HMI yang hampir menyeluruh ada di setiap fakultas maupun di setiap prodi sehingga hal ini dapat memicu terjadi terjadinya konflik, bukan lagi konflik antar organisasi namun konflik antara anggota organisasi itu sendiri. Didalam struktur sosial, individu maupun kelompok yang memiliki otoritas yang mendominasi struktur tersebut (penguasa) berupaya untuk mempertahankan "*status quo*" sedangkan yang berada pada posisi subordinat selalu menghendaki adanya sebuah perubahan. Konflik dalam struktur sosial selalu ditemui, baik secara eksplisit maupun implisit dan penyelesaiannya kemungkinan hanya bisa ketika kedua kelompok tersebut memiliki kepentingan yang sama. Namun secara luas hal ini juga belum tentu mengakhiri sebuah konflik, sebab kemajemukan masyarakat itu sendiri dengan kelompok yang berbeda-beda dan juga kepentingan yang berbeda pula.

Rekonsiliasi Bem Unesa

Rekonsiliasi menjadi titik dimana beberapa kelompok konflik yang ada didalam kampus untuk bersatu kembali. Rekonsiliasi jelas dibutuhkan untuk mengakhiri konflik sosial, pada proses perubahan dan pembaruan selalu mengandung efek ketidakharmonisan bahkan disintegrasi, untuk itu diperlukan adanya suatu mekanisme yang memudahkan terciptanya kembali sebuah kerukunan untuk menyatukan kembali (rekonsiliasi) pranata-pranata yang ada didalam kampus. Rekonsiliasi dalam skala besar, niscaya harus dimulai terlebih dahulu dengan rekonsiliasi internal mulai dari

Hima prodi, DPM fakultas dan BEM fakultas selingkup Unesa.

Rekonsiliasi harus dimulai dari kesediaan dari diri kita semua untuk menerima kenyataan bahwa kita sebagai mahasiswa tanpa terkecuali pernah melakukan kekhilafan kolektif yang berujung pada terjadinya krisis multidimensi. Dalam perspektif ini maka sungguh tidak relevan kecenderungan sementara pihak yang merasa diri paling benar, sebab yang relevan pada kala itu dilakukan oleh mahasiswa adalah langkah kongkrit dengan melakukan koreksi di segala bidang secara sistematis, bertahap dan konstitusional (Tanjung, 2003:12)

Rekonsiliasi tersebut di arahkan melalui musyawarah mahasiswa. Pada akhir 2015 bulan desember BEM Unesa dihidupkan kembali melalui proses musyawarah mahasiswa luar biasa. Hal ini berawal dari kebijakan PR3 yang baru memberikan kesempatan kembali kepada para mahasiswa untuk membentuk kembali BEM Unesa. Pada waktu itu PR 3 memanggil seluruh pimpinan tertinggi fakultas baik dari eksekutif maupun legislatif guna membentuk panitia konsorsium pembentukan kembali BEM Unesa. Setelah panitia konsorsium telah di kumpulkan yang lalu kemudian membentuk tim *ad-hock* yang dimana tim *ad-hock* memiliki hak untuk menyiapkan arena pemilihan kembali BEM universitas.

Setelah tim *ad-hock* terbentuk, mereka membuat draft yang akan menjadi landasan atau aturan pemilihan, garis besar haluan kerja organisasi dan lain-lain yang akan di musyawarahkan bersama ketika dikumpulkannya perwakilan dari beberapa pimpinan yang ada didalam kampus mulai dari tataran prodi jurusan sampai dengan fakultas. Sebagai bentuk perwakilan representatif perwakilan mahasiswa. mengingat alokasi anggaran yang mau tutup buku maka pemilihan pada kala itu dilakukan dengan sistem demokrasi representatif.

Setelah semua persiapan telah dilakukan lalu kemudian proses musyawarah pun dilaksanakan selama 3 hari di dinas koperasi jawa timur yang bertempat di daerah malang. Pada kala itu proses nya di ikuti oleh seluruh pimpinan organisasi inta kampus unesa. Setiap pimpinan mendapatkan satu suara. Pada kala itu yang menjadi kandidat ialah dari FISH, FE dan FIK yang dimana ketiga calon kandidat tersebut adalah kader HMI.

Fenomena yang terjadi pada pemilihan umum raya BEM Unesa pada tahun 2015 yang diwujudkan pada proses musyawarah yang disebut sebagai Musyawarah Mahasiswa (MM) merupakan sebuah konflik internal yang dibawa keranah organisasi kampus, dan dukung kondisi HMI yang mendominasi didalam kampus. Konflik itu sendiri disebabkan oleh kepentingan yang bias. Kepentingan tersebut dapat kita klasifikasikan menjadi dua yakni kepentingan kelompok dan kepentingan individu. dari temuan data dapat disimpulkan

bahwa kepentingan kelompok dapat dibagi menjadi tiga yakni kelompok ingin menduduki organisasi kampus dengan tujuan untuk mendapatkan esistensi didalam kampus. Yang kedua adalah primordial kelompok. Jadi kelompok yang pernah berkuasa ingin melanggengkan kekuasaan dengan cara melanjutkan kepengurusannya kepada junior atau anaknya untuk melanjutkan keuasannya dan yang ketiga *provit oriented* jadi kelompok ingin menduduki organisasi kampus dengan tujuan mendapatkan penghasilan berupa materi, sehingga dapat menambah kas organisasi.

Selain kepentingan kelompok ada pula kepentingan individu yang menyebabkan konflik itu terjadi, Kepentingan individu tersebut yakni seorang mahasiswa yang berharap dirinya menjadi seorang pemimpin di dalam kampus. Sebab ketika menjadi pemimpin di dalam kampus maka mahasiswa tersebut akan populer (eksis) sebagai selebriti kampus. Yang kedua yakni orientasi kekuasaan. Sebab ketika seorang mahasiswa menjadi seorang pemimpin maka banyak akses yang dapat dijangkau. Akses-akses tersebut dapat digunakannya untuk membantu dirinya didalam perkuliahan sebab seorang pemimpin tentunya memiliki hak istimewa diantaranya yakni fasilitas, akses kepemimpinan dan juga kebijakan. Yang ketiga yakni *prestise* atau gelar. Hal inilah yang sering kali menjadi persaingan antara individu, dari beberapa kepentingan tersebut ada beberapa kepentingan yang bias. Yang dimana kepentingan individu dibiaskan menjadi kepentingan kelompok

Menurut Dahrendorf perubahan sistem tidak akan terjadi jika prasyarat perubahan tidak mendukung diantaranya yakni kondisi teknis, kondisi politik dan kondisi sosial. Kondisi teknis menyangkut pada elite yang dapat mengakomodasi anggota dan memiliki kemampuan untuk mengkondisikan anggotanya untuk melakukan perlawanan. Lalu kemudian kondisi politik yang menyangkut mengenai adanya aturan yang menjadi alur organisasi dan yang terakhir adalah kondisi sosial bahwa didalam kelompok semu menjadi alat untuk merekrut anggota sehingga terjadi komunikasi diantara anggota tersebut. (Dahrendorf. 1986 : 230)

Dominasi kelompok HMI sebagai kelompok penguasa atau kelompok superordinat yang selama bertahun tahun menguasai BEM Unesa membuat kelompok-kelompok subordinat menginginkan perubahan pada sistem BEM Unesa. Perubahan tersebut diupayakan selalu dicanangkan dalam kontestasi Pemira. Dalam hal ini praysrat yang sebagaimana diungkapkan oleh Dahrendorf telah terpenuhi.

Tokoh-tokoh elite politik yang menjadi pimpinan Omek seperti PMII, GMNI, dan organisasi yang lain mencoba mengkonsolidasikan gagasan perubahan sistem. Dampak dominasi kelompok penguasa membuat mereka

memiliki pemikiran yang sama dan rasa yang sama, yakni ketidakadilan didalam BEM Unesa. Aspirasi yang tidak didengarkan, merasa telah dicerai dalam proses Pemira dan juga wacana-wacana yang lain yang sekiranya bisa menyulut persatuan dan kesatuan kelompok subordinat. Para *elite* mahasiswa tersebut menyatukan anggota kader mereka untuk melakukan perlawanan. Baik itu perlawanan wacana, pertarungan *issue*, persaingan kegiatan sampai pertarungan antar mahasiswa didalam kelas yang berbeda Omek. Yang dalam hal ini mereka berusaha dan mengupayakan agar pertarungan tersebut dapat merubah sistem yang ada dan tujuannya pada penggulingan kekuasaan. Sebab kondisi teknis sangat mempengaruhi perubahan yang diharapkan oleh kelompok subordinat.

Kondisi politis didalam kampus juga menjadi salah satu prasyarat terjadinya sebuah perubahan didalam kondisi kampus. Kondisi ini mencakup aturan atau norma yang dimana aturan atau norma tersebut menjadi sebuah landasan bagi kelompok subordinat melakukan perubahan sistem ini. Undang-Undang Republik Mahasiswa (UU Rema) menjadi sebuah aturan atau norma dalam berlangsungnya organisasi mahasiswa BEM Unesa. Didalam UU Rema segala sesuatunya telah diatur dan ditetapkan sebagai acuan organisasi. Baik itu berupa sistematika Pemira, Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) organisasi, usulan-usulan kegiatan dari BEM universitas dan lain-lain. Sehingga pada waktu lokakarya draft UU Rema menjadi pertarungan keadilan guna menciptakan organisasi yang objektif dan tidak berpihak pada salah satu calon.

Komunikasi menjadi salah satu kunci dalam sebuah perubahan. Baik komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa, elite mahasiswa dengan mahasiswa, maupun elite mahasiswa dengan elite mahasiswa yang lain. Komunikasi tersebut menyangkut wacana yang telah dibangun bersama oleh para elite kampus yang menginginkan adanya sebuah perubahan. Wacana tersebut disepakati bersama guna menyatukan integritas mahasiswa yang merasa dirinya sebagai kelompok subordinat baik itu dari kelompok Omek, maupun kelompok-kelompok yang lain. Kualitas komunikasi menjadi faktor penting dalam mengkondisikan kondisi sosial didalam kampus

PENUTUP

Simpulan

Kontestasi Pemira 2013/2014 merupakan proses regenerasi struktural BEM Unesa untuk membentuk kepengurusan yang baru. Kontestasi tersebut diikuti oleh tiga Omek besar yakni PMII, HMI dan GMNI. Didalam teori Dahrendorf disebut sebagai kelompok kepentingan karena kelompok tersebut memiliki agen rill dari konflik

kelompok. Karena adanya aturan dari Dirjen Dikti tentang Omek dilarang masuk ke kampus maka kelompok kepentingan tersebut melahirkan kelompok semu. Pada proses pendaftaran asosiasi mahasiswa kelompok kepentingan mendirikan asosiasi yang dimana kelompok semu tersebut dirubah menjadi kelompok kepentingan yang secara eksplisit mendapat legalitas dari kampus yang secara implisit membawa kepentingan Omek terkait. Sehingga dari hal ini menimbulkan kelompok konflik didalam mahasiswa.

Konflik tersebut terbagi menjadi dua yakni konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal terjadi melibatkan antara mahasiswa, dosen, dan birokrasi. Sedangkan konflik horizontal terjadi melibatkan antara mahasiswa dengan mahasiswa yang berada didalam satu naungan kelompok. Hal disebabkan oleh perbedaan ideologi Omek, perebutan eksistensi kelompok maupun individu, adanya orientasi provit, distribusi otoritas yang tidak merata dan fenomena kelompok penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaan. Dari beberapa faktor penyebab konflik tersebut menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan didalam tatanan sosial. Sehingga dari persaingan tersebut melahirkan kelompok Superordinat dan subordinat. HMI sebagai kelompok penguasa menempati posisi kelompok superordinat dan kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi tersebut menjadi kelompok subordinat. Karena gesekan pada waktu proses Pemira terlalu keras dan berpotensi kearah perusakan sarana dan prasarana umum maka pada Pemira periode 2013/2014 dibekukan.

Pada periode berikutnya pembantu Rektor 3 (PR 3) memberikan kesempatan kembali kepada mahasiswa untuk membentuk kembali struktur BEM universitas. Namun pada kala itu prosesnya mengalami kegagalan yang dikarenakan waktunya terlalu singkat, panitia *ad-hock* yang terdiri dari perwakilan fakultas berada akhir kepengurusan, dan panitia *ad-hock* juga kurang *kompatible*. Sehingga pembentukan kembali BEM Unesa mengalami kegagalan atau dibekukan kembali.

BEM Unesa yang dibekukan selama dua periode akhirnya dibentuk kembali pada periode 2015/2016 yang dimana prosesnya berbeda dengan proses sebelumnya yakni melalui Musyawarah Mahasiswa (MM) proses pembentukan kembali itu diikuti oleh seluruh pimpinan tertinggi dari fakultas maupun hima prodi. Didalam proses MM tersebut para pimpinan dari fakultas maupun hima membentuk Undang-Undang Rema sebagai landasan organisasi, Garis Besar Haluan Kerja (GBHK), membentuk struktural BEM Unesa dengan menentukan Presiden dan wakil presiden BEM Unesa serta usulan kegiatan untuk struktural BEM Unesa terpilih.

Konflik Pemira yang begitu keras akan menimbulkan dampak, baik itu dampak terhadap internal kampus

maupun eksternal kampus. Dampak terhadap internal kampus yakni eksekutor kebijakan birokrasi kampus, kontrol sosial pada birokrasi kampus dan wadah yang menampung aspirasi mahasiswa. Ketika BEM Unesa dibekukan peran-peran tersebut mengalami kekosongan. Dampak terhadap eksternal kampus meliputi eksistensi kampus dengan kampus lain, perwakilan mahasiswa dalam kegiatan diluar kampus yang membawa nama baik kampus dan hubungan kampus dengan kampus menjadi terputus.

Saran

Konflik sosial dikalangan mahasiswa merupakan sebuah fenomena yang wajar. Dinamika politik didalam kampus merupakan sebuah proses belajar bagi mahasiswa sebelum terjun kemasyarakat. Ketika di masyarakat gesekan-gesekan tersebut akan semakin keras. Namun tidak selayaknya dalam proses belajar tersebut diwarnai dengan kericuhan yang menghasilkan sebuah tindak pidana. Baik berupa perusakan fasilitas umum, gesekan fisik, ataupun tindakan pidana yang lain. Semangat muda para mahasiswa seharusnya bisa di kontrol sehingga tidak merugikan orang lain. Kontestasi pemilihan umum raya haruslah disikapi dengan dewasa, sebab menang dan kalah merupakan hal yang lumrah dan kedua belah pihak harus bisa berbesar hati.

Penelitian mengenai aktivis mahasiswa memerlukan sebuah keberanian dan objektivitas yang tinggi. penelitian yang menyangkut aktivis mahasiswa juga sifatnya sangat sensitif. Sebab penelitian ini menyangkut ideologi, kepentingan dan juga hal-hal yang bersifat rahasia. Sehingga menuntut bagaimana caranya agar peneliti dalam melakukan penelitian ini memiliki dasar atau landasan yang rasional. Kedalaman peneliti dalam mencari data sangat mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Semakin dalam data yang ditemukan maka kualitas penelitian tersebut semakin bagus

Penelitian ini menarik untuk ditindaklanjuti dan dikembangkan mengingat perkembangan mahasiswa yang dinamis sehingga selalu terjadi sebuah perubahan sosial didalamnya. Jika dibandingkan aktivis mahasiswa yang sekarang dengan mahasiswa pada masa orde lama, orde baru, maupun reformasi terjadi sebuah pergeseran nilai, pergeseran orientasi maupun aktualisasi. Pergerakan mahasiswa dari kota satu dengan kota yang lain tentu berbeda sehingga fenomenanya juga akan berbeda. Sebab banyak faktor yang mengakibatkan perbedaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Anthony Giddens 2009. *Masa Depan Politik Radikal*.
Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Arifin, Samsul.2003. *Islam Indonesia*. Malang : UMM
press

Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam
Masyarakat Industri*. Jakarta : CV Rajawali

Faulks.Keith. 2010. *Sosiologi politik pengantar kritis*.
Bandung : Nusa media

Lexy J, Moleong, 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*.
Bandung : PT Remaja rosdakarya.

Magnis-suseno. franz. 1999. *Pemikiran karl marx* .
jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Marwati djoened dkk. 1975. *Sejarah nasional indonesaia*
jilid V. Jakarta : departemen pendidikan dan
kebudayaan

Ng.philipus dan Nurul Aini. 2004. *Sosiologi dan Politik*.
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Poloma, Margaret M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*.
Jakarta : CV Rajawali

Prof.Dr.Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung : Alfabeta

Railon., Francois. 1985 *poilitik dan Ideologi mahasiswa*
indonesia. jakarta : LP3ES

Ritzer.George dan Douglas J. Goodman. 2011. *Teori
Sosiologi Modern*. Jakarta :Kencana Prenada
Media.

Rudy Badil. 2009. *Soe Hok Gie sekali lagi*. Jakarta

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta
: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tanjdung, Akbar. *Moratorium Politik menuju
Rekonsiliasi Nasional*. Jakarta : Golkar press

Yozar Anwar. 1981 "Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20
Jakarta : Sinar Harapan

Widjojo. Muridan S. 1999. *Penakluk Rezim Orde Baru*.
Jakarta : CV Efata

Zainal Abidin.Yusuf dan Beni Ahmad Saebani. 2014.
Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia.
Bandung : CV Pustaka Setia.

Online :

SK KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155/U/1998 Tentang Pedoman
Umum Organisasi Kemahasiswaan di
Perguruan Tinggi
http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendikbud_155_1998.ht

